

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

ASEAN – China Free Trade Area Agreement (ACFTA) adalah kesepakatan yang dilaksanakan untuk menurunkan tarif impor secara bertahap sejak tahun 2005, yang diimplementasikan oleh ASEAN-6, termasuk antara Indonesia dan Tiongkok, serta implementasi penuhnya dalam bentuk pemberlakuan tarif 0% dimulai sejak 1 Januari tahun 2010. Dalam penerapan perdagangan bebas dalam sistem ACFTA, khususnya terhadap perjanjian yang dijalankan antara Indonesia-dengan Tiongkok, menunjukkan bahwa Tiongkok lebih diuntungkan dan lebih unggul terutama dalam industri elektronik dan telekomunikasi pada produk telepon genggam. Tiongkok yang merupakan sebuah negara dengan penghasil produk telepon genggam terbesar di dunia menjadi salah satu pesaing utama bagi Indonesia dalam kegiatan perdagangan pasar bebas pada bidang industri elektronik dan telekomunikasi dengan menghasilkan berbagai kualitas telepon genggam yang canggih, perangkat telekomunikasi yang bagus serta dipasarkan dengan harga miring apabila dibandingkan dengan produk telepon genggam produksi Indonesia. Memiliki kualitas dan kecanggihan yang lebih unggul dibanding dengan telepon genggam Indonesia dikarenakan pada negeri tirai bambu itu sendiri dikenal sebagai negara dengan penghasil komponen telepon genggam terlengkap dengan disertai kemajuan teknologi yang canggih, sedangkan pada Indonesia sendiri belum memiliki kemajuan teknologi yang cukup baik dalam menyaingi produk asal Tiongkok tersebut. Selain itu Indonesia juga mengalami kurangnya SDA dalam pembuatan dan pengembangan chip, mainboard, semi-conductor, dan

juga LCD monitor serta komponen yang belum memadai dalam melakukan produksi lebih lanjut.

Sedangkan dalam pembuatan produk elektronik seperti telepon genggam komponen seperti chip dan perlunya SDM yang ahli dalam bidang tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatannya. Sementara itu Indonesia sendiri memang belum mampu dalam membuat komponen tersebut. Walau Indonesia sendiri memiliki jumlah SDM yang melimpah serta lebih unggul apabila dibandingkan dengan Tiongkok, namun SDM yang ahli dalam pembuatan komponen produk telepon genggam belum memadai dan masih kurang. Selain itu dengan memiliki teknologi yang lebih maju dan canggih Tiongkok dapat menghasilkan berbagai produknya secara massal dan cepat dalam pengembangannya sehingga distribusi produk yang dilakukan Tiongkok dapat tersebar luas dan cepat pada pasar bebas maupun pasar global.

Berbagai Instansi Pemerintah Indonesia khususnya pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan beberapa peraturan, perjanjian, upaya kerja sama dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan Tiongkok dalam pengembangan produk telepon genggam dalam skema ACFTA khususnya, serta berperan penting dalam melaksanakan perjanjian kerja sama dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam menghadapi persaingan ini adalah dengan membenahi kesiapan pada industri telekomunikasi Indonesia untuk menghadapi negeri tirai bambu tersebut dalam kerja sama perdagangan ACFTA dengan cara penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) guna melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor hasil produksi Tiongkok yang terus berdatangan.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan daya saing industri telekomunikasi dan elektronik ini agar Indonesia siap dalam melakukan persaingan secara penuh pada pasar global ataupun dengan produk Tiongkok itu sendiri melalui berbagai kerja sama dengan produk serta

vendor elektronik asal Tiongkok. Dalam meningkatkan kualitas serta komponen pada telepon genggam produksi Indonesia, Pemerintah dihadapi dengan berbagai perjanjian dan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai produk serta instansi asal Tiongkok. Strategi pemerintahan yang melakukan perjanjian kerja sama diantaranya adalah kerja sama instansi perusahaan Indonesia seperti Smartfren, Telkomsel, dan bahkan Kementerian perdagangan turut melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan asing. Perusahaan asing yang menandatangani perjanjian dengan Indonesia diantara lainnya adalah Lenovo, Huawei, serta ZTE Corporation. Strategi kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan telekomunikasi dan elektronik asal Tiongkok ini bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai peralatan elektronik seperti telepon genggam yang memiliki kualitas teknologi canggih. Salah satu upaya yang memiliki strategi yang besar pada pemerintahan adalah dengan pengembangan jaringan 5G di kawasan Indonesia. Selain itu berbagai upaya tersebut adalah hasil kesepakatan Pemerintah dengan perusahaan Tiongkok dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapi berbagai sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak oleh perjanjian ACFTA itu sendiri.

Namun dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, nampaknya beberapa upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan lancar. Upaya yang diberikan oleh pemerintah masih kurang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia yang khususnya terlibat dalam kalangan industri telekomunikasi dan elektronik. Setelah ACFTA diimplementasikan oleh pemerintah pada tahun 2010 kekhawatiran para pelaku ekonomi serta perusahaan yang berfokus pada industri elektronik terbukti, pasalnya setelah beberapa perjanjian dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah tepat pada sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021 nilai impor telepon genggam produksi Tiongkok terus bermasukan dan melonjak naik pada pasar lokal dampak dari hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan lokal yang kalah dalam persaingan produknya, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Lalu sebaliknya, berbagai produk lokal juga masih mengalami kesulitan dalam memasuki pada pasar

Tiongkok mengingat Tiongkok itu sendiri merupakan pesaing pertama Indonesia selain dengan Korea Selatan dan Vietnam sebagai perusahaan telepon genggam yang memiliki teknologi yang canggih dan sesama kompetitor dalam bidang elektronik.

Selain itu berbagai perusahaan elektronik Indonesia juga belum mampu memaksimalkan penetrasi pada pasar Tiongkok sebagaimana produk produksi Tiongkok di Indonesia. Namun terdapat hal yang mengkhawatirkan Pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam negeri, yakni produk telepon genggam produksi Indonesia mengalami kalah dalam persaingan produknya dan mengalami kehilangan eksistensinya dalam negara sendiri karena harga produknya lebih memiliki harga mahal dibandingkan dengan hasil produksi Tiongkok serta mnghasilkan barang yang kurang inovatif. Permintaan masyarakat lokal tentunya memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan industri elektronik terutama terhadap perusahaan dan instansi menengah kebawah karea produk mereka diorientasikan untuk para pelaku dalam pasar domestik. Akibat dengan ketidak kuatannya bersaing dalam industri elektronik, banyak perusahaan menengah kebawah asal Indonesia yang tutup atau beralih menjadi pedagang bukan menjadi produsen dari produk tersebut, dan tentu banyak SDM yang berkurang diakibatkan oleh pengangguran tentu hal ini akan meningkat mengingat kembali bahwa industri elektronik merupakan salah satu industri terbesar dan dapat memperkerjakan banyak karyawan dalam pengembangan teknologi dalam telepon genggam produksi Indonesia.

Pemerintah Indonesia melihat sebuah peluang dan manfaat dari ACFTA karena pada pasar Tiongkok sendiri merupakan pasar yang besar dengan menghasilkan beragam produk , namun nampaknya pemrintah belum memiliki kesiapan yang cukup, belum mampu dalam menghadapi dampak lainnya, serta tidak melihat produk pasar yang diminati oleh Tiongkok sendiri. Kendala Pemerintah Indonesia dalam menjalani berbagai usaha yang dikeluarkan untuk menghadapi dan meminimalisir masuknya produk impor Tiongkok mulai terlihat selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021. Kendala yang kerap dihadapi

diantaranya adalah, penerapan SNI yang dinilai kurang maksimal dan kurang siapnya dalam penerapan peraturan tersebut, program penggunaan produk dalam negeri yang masih dinilai kurang efektif, infrastruktur Indonesia yang belum memadai, dan masih banyaknya SDM yang kurang dibudidayakan dengan baik. Walau begitu pemerintah juga menemukan sisi terang dan harapan yang tinggi dengan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai perusahaan asing asal Tiongkok, serta peluang dari pengimplementasian ACFTA di Indonesia dengan memanfaatkan para investor serta melakukan investasi pada pasar global.

VI.2 Saran

Upaya pemerintah Indonesia untuk sektor dalam negeri harus lebih ditekankan pada pengurangan biaya ekonomi tinggi seperti infrastruktur, energi SDM dan komponen elektronik terhadap telepon genggam, serta mengimpor komponen elektronik yang berguna pada perangkat telepon genggam dari negara-negara dengan penghasil komponen elektronik yang baik, serta melonggarkan birokrasi bagi pemangku kepentingan sektor elektronik Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih gencar menggelar pameran dan kerja sama produk nasional di Tiongkok atau pameran di Indonesia sendiri dengan bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi di tingkat dan skala internasional. Selain itu, Pemerintah sebaiknya lebih banyak melibatkan pengusaha industri telekomunikasi dan elektronik dalam negeri guna memperluas jaringan informasi tentang kebutuhan masyarakat Tiongkok, sehingga meningkatkan nilai ekspor produk elektronik berupa telepon genggam Indonesia pada pasar Tiongkok. Sumber daya manusia atau SDMA di Indonesia perlu lebih ditingkatkan dan dibudidayakan tenaga dan usahanya dengan cara perlunya sebuah peningkatan kerja sama dengan perusahaan asing yang mendirikan pabriknya di Indonesia agar para SDM di Indonesia dapat dipekerjakan dan mendapatkan haknya sebagai pekerja.

VI.2.1 Saran Praktis

Ekspor non migas berupa nikel yang menjadi primadona ekspor Indonesia. Terlebih bahan baku berupa nikel dapat bermanfaat bagi pembuatan sperpat pada telepon genggam, saran penulis dalam hal ini diharapkan untuk kedepannya Pemerintah terus bisa menjalani kerja sama dengan perpaduan komponen perusahaan elektronik Tiongkok agar terus meningkatkan kualitas dan komponen telepon genggam yang lebih canggih serta dapat menyaingi berbagai produk telepon genggam asing pada pasar global. Selain itu pentingnya bagi Pemerintah untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa masuknya berbagai produk impor asal Tiongkok tidaklah sesuatu yang merupakan hel negatif pada keseluruhannya. Terkadang ada waktunya bagi Indonesia sendiri hal tersebut merupakan kebutuhan dalam pengembangan produk nya sendiri, hal ini dapat dicontohkan seperti kerja sama serta melakukan kegiatan impor produk dalam pembuatan telepon genggam yang dimana Indonesia dapat berkolaborasi dengan vendor asing dengan menggunakan sperpat asing dalam pembuatan produknya mengingat dalam negeri sendiri Indonesia masih kesulitan dan sangat tidak mungkin unntuk menghasilkan beberapa sperpat dengan teknologi tinggi guna pembuatan produk tersebut.

VI.2.2 Saran Teoritis

Melalui saran teoritis ini, selama melaksanakan penelitian penulis banyak melihat berbagai penelitian yang berfokus mengenai peran pemerintah dalam meminimalisir berbagai produk impor Tiongkok, terkhusus pada tekstil dan produk rumah tangga lainnya. Padahal apabila dilihat dalam perkembangan teknologi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, teknologi serta alat elektronik memiliki peran penting dalam melaksanakan sebuah pertemuan, perjanjian, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, peran teknologi dan alat elektronik memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekonomi negara Indonesia. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih dalam mengenai berbagai inovasi dan upaya yang dilakukan Pemerintah guna melihat perkembangan dan

peran Pemerintah itu sendiri dalam memajukan perkembangan teknologi serta alat elektronik di Indonesia.